



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2025

Dinas Sosial Kabupaten Bangka

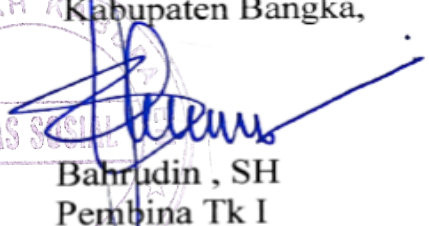
Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rancangan Awal Rencana Kerja ini disusun dalam rangka memberikan acuan dalam menjalankan urusan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan perencanaan yang konsisten dengan proses evaluasi dan pengendalian dari dokumen perencanaan itu sendiri.

Rancangan Awal Rencana Kerja ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan dalam penyajiannya maupun penyusunannya, oleh karena itu saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu dalam membuka wawasan sehingga pada saatnya akan dapat memperbaiki kinerja serta penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Sungailiat, Januari 2024

Kepala Dinas Sosial,
Kabupaten Bangka,

Bahrudin, SH
Pembina Tk I
NIP 19670714 198809 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
BAB II EVALUASI RENJA	II - 1
BAB III TUJUAN DAN SARAN	III - 1
BAB IV RENCANA KERJA.....	IV - 1
PENUTUP.....	V - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Bangka merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas Bupati pada urusan Sosial, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai salah satu proses perencanaan terpadu dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, maka dibutuhkan perencanaan dari masing-masing OPD yang menggambarkan rancangan rencana kerja dari OPD yang bersangkutan setiap tahunnya.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja OPD Tahun 2024 mengacu pada RPJMPD Kabupaten Bangka 2005-2025. Rancangan Awal Rencana Kerja OPD 2024 disusun untuk mencapai target kinerja tahun 2025. Setiap OPD diamanatkan untuk bekerja guna mencapai sasaran pembangunan dengan indikator yang telah terukur.

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Ranwal Renja OPD mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal berikut:

1. Ranwal Renja OPD merupakan dokumen yang memuat kebijakan, rencana program, kegiatan dan kebutuhan anggaran indikatif kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA).
2. Ranwal Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Ranwal Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Awal Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
27. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe B Kabupaten Bangka;
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan rancangan awal rencana kerja ini adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangka tahun 2024 - 2026.
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan OPD.
4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya organisasi.
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ketahun dan keselarasan program, kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

1.4. SistematikaPenulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Ranwal Renja Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022
3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4. BAB IVPENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

Dalam penyusunan Renja awal Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bangka per Program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 tersaji seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
per Program sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

OPD : DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi (%)			
		Kinerja	kategori *)	Keuangan	Kategori*)
1	2	6	7	8	9
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	95,06	ST	95,06	ST
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95,54	ST	95,54	ST
1.06.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	ST	94,55	ST
1.06.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	ST	85,3	T
1.06.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	ST	85,3	T
1.06.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100	ST	98,4	ST
1.06.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	100	ST	94,8	ST
1.06.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	ST	100	ST
1.06.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	ST	91,6	ST
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	ST	93,49	ST
1.06.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	ST	93,48	ST

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi (%)			
		Kinerja	kategori *)	Keuangan	Kategori*)
1	2	6	7	8	9
1.06.01.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	100	ST	100	ST
1.06.01.2.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	ST	77,85	T
1.06.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	ST	94,25	ST
01.06.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	ST	99,48	ST
1.06.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	ST	99,51	ST
1.06.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	ST	99,47	ST
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	ST	97,62	ST
1.06.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	ST	96,81	ST
1.06.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	ST	100	ST
1.06.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	ST	100	ST
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	ST	97,25	ST
1.06.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	100	ST	93,4	ST
1.06.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	ST	99,57	ST
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	ST	98,69	ST
1.06.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	100	ST	99,35	ST
1.06.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	ST	91,23	ST
1.06.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	ST	98,38	ST
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	ST	96,83	ST
1.06.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	ST	96,81	ST

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi (%)			
		Kinerja	kategori *)	Keuangan	Kategori*)
1	2	6	7	8	9
1.06.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	ST	90,49	ST
1.06.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	ST	99,39	ST
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100	ST	97,64	ST
1.06.02.2.02	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	ST	68,13	S
1.06.02.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100	ST	68,13	S
1.06.02.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100	ST	97,89	ST
1.06.02.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	ST	99,81	ST
1.06.02.2.03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	ST	99,99	ST
1.06.02.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	ST	89,84	T
1.06.02.2.03.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	ST	94,75	ST
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100	ST	98,02	ST
1.06 .04. 2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	ST	99,53	ST
1.06.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	100	ST	99,42	ST
1.06.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	100	ST	99,35	ST
1.06.04.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	100	ST	99,63	ST

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi (%)			
		Kinerja	kategori *)	Keuangan	Kategori*)
1	2	6	7	8	9
1.06.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100	ST	99,85	ST
1.06.04.2.01.12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	100	ST	100	ST
1.06 .04 .2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100	ST	96,56	ST
1.06.04.2.02.03	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	100	ST	96,14	ST
1.06.04.2.02.05	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	100	ST	98,27	ST
1.06.04.2.02.07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100	ST	96,14	ST
1.06.04.2.02.11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan penelusuran Keluarga	100	ST	99,82	ST
1.06.04.2.02.12	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100	ST	87,04	ST
1.06.04.2.02.13	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	100	ST	99,22	ST
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100	ST	75,32	S
1.06 .05.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100	ST	87,73	T
1.06.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	100	ST	87,73	T
1.06 .05. 2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	ST	75,15	S
1.06.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	ST	97,73	ST
1.06.05.2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota	100	ST	93,46	ST
1.06 .05 .2.02.03	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	46,31	ST	45	SR
1.06.05.2.02.04	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100	ST	98,16	ST

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi (%)			
		Kinerja	kategori *)	Keuangan	Kategori*)
1	2	6	7	8	9
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100	ST	98,86	ST
1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100	ST	98,86	ST
1.06.06.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	100	ST	98,86	ST
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100	ST	63,99	R
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100	ST	63,99	R
1.06.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	63,99	ST	63,99	R
JUMLAH		91,71	ST	91,41	ST

Keterangan Kategori *)

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
91 ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST
76 ≤ 90 %	Tinggi	T
66 ≤ 75 %	Sedang	S
51 ≤ 65 %	Rendah	R
≤ 50 %	Sangat Rendah	SR

Pada triwulan IV sampai bulan Desember 2023 kinerja dan keuangan dapat dilihat pada tabel diatas, dimana semua program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bangka yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial semuanya untuk laporan kinerja 100 % dan laporan keuangan sebesar 91,41 % dengan kategori sangat tinggi.

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah laporan kinerja 100 % dan keuangan 95,06 % dengan kategori sangat tinggi. Program Pemberdayaan Sosial

laporan kinerja dan keuangan sebesar masing-masing 100 % dan 97,64 % dengan realisasi kinerja sangat tinggi. Program Rehabilitasi sosial laporan Fisik dan keuangan masing-masing sebesar 100 % dan 98,02 % dengan kategori sangat tinggi. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Laporan kinerja dan keuangan sebesar masing-masing 75,32% dan 75,32 % dengan kategori sangat tinggi untuk kinerja dan katogori sedang untuk keuangan yang disebabkan oleh sub kegiatan yang menyangkut asuransi ketenagaakerjaan bagi petani sawit dan pekerja sawit yang rentan tidak diperbolehkan dilaksanakan pada akhir tahun dengan anggaran perubahan dikarenakan APBD Kabupaten Bangka mengalami defisit. Program Penanganan Bencana Laporan fisik dan Laporan keuangan sebesar 100 % dan 98,86 % dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan untuk Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan laporan kinerja dan keuangan masing-masing 63,99% dan 63,99 % dengan kategori untuk kinerja kategori sangat tinggi dan keuangan kategori rendah karena disebabkan oleh defisit anggaran tahun 2023 , Dimana kegiatan Rehab pagar Makam Pahlawan tidak boleh dilaksanakan oleh BPPKAD karena defisit anggaran yang terjadi. untuk Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2023 Dinas Sosial Kabupaten Bangka sampai dengan triwulan IV tahun 2023 tersaji dalam Tabel berikut:

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKPD Dinas Sosial Kabupaten Bangka **Periode Pelaksanaan : Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2023**

No	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 15 = 14/6 x 100%		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
																I				II				III													IV			
																6	7		8		9				10				11				12				13			
1	2	3						4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16								
		1	0	6					BIDANG URUSAN SOSIAL			13.993.792.456		35.732.042.406		8.916.566.670			868.025.619			2.562.436.105			2.485.576.842			2.234.156.106			8.150.194.672			43.190.122.898			308,64			
1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	1	0	6	0	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial (%)	90,00	1.568.683.167	85,00	3.850.543.480	90,00	1.745.748.070	4,44	4,00	44.145.350	0,00		702.813.600	0,00		261.199.530	0,00		696.323.310	4,44		1.704.481.790	89,44	5.472.338.390	80,00	348,85	DINSOS				
		1	0	6	0	2	2	0	2	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Sumbangan yang Memiliki Izin (%)	100	100.000.000	90,00	72.466.880	100	15.000.000	4,00	4,00	1.220.000	0,00			0,00		2.050.000	0,00		6.950.000	4,00		10.220.000	90,00	10.999.744.100	90,00	10999,74				
		1	0	6	0	2	2	0	2	0	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (dokumen)	150	100.000.000	65	72.466.880	30	15.000.000	13,33	4	1.220.000	0,00			0,00		2.050.000	86,67	26,00	6.950.000	100,00	30	10.220.000	95,00	82.686.880	63,33	82,69		
		1	0	6	0	2	2	0	3			Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (%)	90,00	1.468.683.167	85,00	3.778.076.600	90,00	1.730.748.070	0,00			42.925.350	0,00		702.813.600	0,00		259.149.530	0,00		689.373.310	0,00		1.694.261.790	85,00	5.472.338.390	94,44	372,60	
		1	0	6	0	2	2	0	3	0	1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	243	578.623.182	81	1.561.858.360	81	1.006.900.000	0,00	0,00	1.530.000	0,00			409.320.000	0,00		165.610.000	100,00	81,00	428.549.170	100,00	81	1.005.009.170	162,00	2.566.867.530	66,67	443,62	
												Insentif Pekerja sosial Masyarakat (PSM) (orang)		243		81	-	0		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0	-	81,00	-	33,33					
		1	0	6	0	2	2	0	3	0	2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	24	56.581.033	16	131.398.400	8	100.000.000	0,00	0,00	1.000.000	0,00			40.000.000	0,00		16.000.000	100,00	8	42.990.000	100,00	8	99.990.000	24,00	231.388.400	100,00	408,95	
												Insentif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (orang)		24		16	-	0		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0	-	16,00	-	66,67							
		1	0	6	0	2	2	0	3	0	3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (keluarga)	36	738.987.930	24	1.160.641.400	29	37.500.000	0,00	0,00	-	0,00			1.640.000	0,00		1.800.000	100,00	29	30.250.000	100,00	29	33.690.000	53,00	1.194.331.400	147,22	161,62	
												Insentif Taruna Siaga Bencana (TAC-ANA) (bulan)		36		24	-	0		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0	-	24,00	-	66,67							

			1	06	02	2	03	04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (lembaga)	90	66.899.664	60	896.558.880	30	586.349.070	16,67	5,00	40.395.350	0,00		251.853.600	0,00		75.739.530,00	100,00	30	187.584.140	116,67	35	555.572.620	95,00	1.452.131.500	105,56	2170,61		
									Jumlah Karang Taruna yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (Karang Taruna)	267			89	-	0		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00		0		0,00	89,00	-		33,33			
			1	06	02	2	03	05	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Layanan Jasa LK3 Yang Tertangani (bulan)	36	27.591.357	24	27.619.560	0	-	0,00	0	-	0,00	-	0,00			0,00	-	0,00	0	-	0,00	24,00	27.619.560	66,67	100,10			
Rata rata capaian kinerja (%)																		7,50		2,48	0,00		40,61	0,00		14,97	121,67		39,83	129,17		97,89			74,94	348,85	
Predikat Kinerja																		SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		SR	ST		ST			S	ST	
2	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1	06	04					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	100	1.348.243.546	80,00	843.953.500	100	309.800.000	0,00		17.890.000	0,00		16.260.000	0,00		219.775.000	0,00		49.745.000	0,00		303.670.000	0,00	538.196.200	0,00	39,92	DINSOS	
		1	06	04	2	01			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar (%)	40,00	383.674.627	40,00	234.526.200	40,00	152.600.000	0,00		8.610.000	0,00		7.300.000	0,00		119.025.000	0,00		16.950.000	0,00		151.885.000	40,00	386.411.200	100	100,71		
		1	06	04	2	01	01		Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	345	94.647.100	162	45.000.000	100	60.000.000	0,00	0,00	2.000.000	0,00	0	2.000.000	100,00	100	52.880.000	0,00	0,00	2.770.000	100,00	100	59.650.000	262	104.650.000	75,94	110,57		
		1	06	04	2	01	02		Sub Kegiatan Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	3	64.000.000	2	59.976.000	50	30.000.000	0,00	0,00	2.500.000	0,00	0	3.300.000	100,00	50	21.505.000	0,00	0,00	2.500.000	100,00	50	29.805.000	52	89.781.000	173,33	140,28		
		1	06	04	2	01	03		Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	150	64.072.229	32	44.976.000	30	40.000.000	0,00	0,00	2.000.000	0,00		2.000.000	100,00	30	33.080.000	0,00	0,00	2.770.000	100,00	30	39.850.000	62	84.826.000	41,33	132,39		
		1	06	04	2	01	05		Sub Kegiatan Pembinaan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	90	104.136.858	80	40.116.400	50	13.600.000	0,00	0	1.410.000	0,00	0	-	0,00	0	5.740.000	100,00	50	6.430.000	100,00	50	13.580.000	130	53.696.400	144,4	51,56		
		1	06	04	2	01	12		Sub Kegiatan Pembinaan Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	60	56.818.440	45	44.457.800	20	9.000.000	25,00	5,00	700.000	0,00	0	-	50,00	10	5.820.000	25,00	5	2.480.000	100,00	20	9.000.000	65	53.457.800	108,33	94,09		

		1	06	04	2	02		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	40,00	964.568.920	30,00	609.427.300	40,00	157.200.000	0,00		9.280.000	0,00		8.960.000	0,00		100.750.000	0,00		32.795.000	0,00		151.785.000	30,00	151.785.000	75,00	15,74	
		1	06	04	2	02	03	Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	300	133.954.742	275	104.720.000	150	60.000.000	0,00	0,00	2.720.000	0,00	0,00	-	100	150	51.490.000	0,00	0,00	3.475.000	100,00	150	57.685.000	425	57.685.000	141,67	43,06	
		1	06	04	2	02	05	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	300	160.000.000	60	44.964.000	30	52.000.000	0,00	0,00	1.500.000	0,00	0,00	-	100	30	43.990.000	0,00	0,00	5.610.000	100,00	30	51.100.000	90	51.100.000	30,00	31,94	
		1	06	04	2	02	07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	1800	77.209.178	440	63.376.800	100	16.200.000	0,00	0	2.120.000	100,00	100	5.200.000	0,00	0	3.150.000	0,00	0,00	5.105.000	100,00	100	15.575.000	540	15.575.000	30,00	20,17	
		1	06	04	2	02	11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	24	45.000.000	10	29.780.500	10	8.500.000	20,00	2	820.000	10,00	1	820.000	0,00	0	-	70,00	7	6.845.000	100,00	10	8.485.000	20	8.485.000	83,33	18,86	
		1	06	04	2	02	12	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	24	17.000.000	15	36.818.800	10	11.500.000	10,00	1	-	20,00	2	2.940.000	0,00	0	-	50,00	5	7.070.000	80,00	8	10.010.000	23	10.010.000	95,83	58,88	
		1	06	04	2	02	13	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	45	531.405.000	32	329.767.200	20	9.000.000	25,00	5	2.120.000	0,00	0	-	0,00	0	2.120.000	25,00	5	4.690.000	50,00	10	8.930.000	42	8.930.000	93,33	1,68	
Rata rata capaian kinerja (%)																7,27	5,77	11,82		5,25	50,00		70,94	24,55	16,06	93,64		98,02		257,76	63,95				
Predikat Kinerja																SR	SR	SR		SR	SR		S	SR	SR	ST		ST		ST	R				
3	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial	1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial (%)	65,00	3.988.588.770	62,50	16.049.987.265	65,00	1.095.000.000	0,00		7.580.000	0,00		215.792.800	0,00		522.145.826	0,00		79.209.510	0,00		824.728.136	0,00	16.874.715.401	60,00	423,07	DINSOS
		1	06	05	2	01		Kegiatan Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang mendapat pemeliharaan (%)	50,00	58.732.876	45,00	58.628.820	50,00	15.000.000	0,00		1.230.000	0,00		3.610.000	0,00		1.345.000	0,00		6.975.000	0,00		13.160.000	0,00	71.788.820	40,00	122,23	
		1	06	05	2	01	03	Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	20	58.732.876	16	58.628.820	15	15.000.000	6,67	1	1.230.000	26,67	4	3.610.000	20,00	3	1.345.000	0,00		6.975.000	53,33	8	13.160.000	24	13.160.000	120,00	22,41	
		1	06	05	2	02		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Yang Dikelola (%)	85	3.929.855.894	85,00	15.991.358.445	85,00	1.080.000.000	0,00		6.350.000	0,00		212.182.800	0,00		520.800.826	0,00		72.234.510	0,00		811.568.136	85,00	15.109.481.381	100,00	384,48	

		1	0 6	0 5	2	0 2	0 1	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	980 00	215.022.20 8	980 00	348.362.64 0	980 00	15.000.000	0,00	0,0 0	2.300.000	0,00		1.600.000	0,00		6.680.000	0,00		4.080.000	0,00	0	14.660.000	9800 0	14.660.000	100,0 0	6,82	
		1	0 6	0 5	2	0 2	0 2	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota a	3	1.914.833. 667	2	339.551.76 0	300 00	85.000.000	0,00	0,0 0	300.000	0,00		11.564.000	0,00		11.436.580	0,00		56.144.510	0,00	0	79.445.090	2	79.445.090	66,67	4,15	
		1	0 6	0 5	2	0 2	0 3	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	69	1.706.000. 000	53	14.297.913 .245	0	460.000.000	0,00	0,0 0	2.520.000	0,00	0,0 0	197.418.800	0,00		2.778.300	0,00		4.290.000	0,00	0	207.007.100	53,0 0	14.504.920.34 5	76,81	850,2 3	
		1	0 6	0 5	2	0 2	0 4	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembang an Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota a	3	94.000.000	2	1.005.530. 800	15	520.000.000	0,00	0,0 0	1.230.000	0,00	0,0 0	1.600.000	346, 67	52	499.905.946	0,00		7.720.000	346,6 7	52	510.455.946	54	510.455.946	1800, 00	543,0 4	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																1,3 3		0,69	5,3 3		19,71	73, 33		47,68	0,00		7,23	80,0 0		75,32		154, 53	423, 07		
Predikat Kinerja																SR		SR	SR		SR	S		SR	SR		SR	T		T		ST	ST		
4	Meningkatn ya Kesiapsiag aan dan Tanggap Cepat Darurat Terhadap Kejadian Pasca Bencana	1	0 6	0 6				PROGRAM PENJAJANGAN BENCANA	Persentase Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat Terhadap Kejadian Pasca Bencana (%)	65,0 0	447.000.00 0	0,00	-	65,0 0	447.000.000	0,00		70.525.000	0,00		112.090.000	0,00		111.965.000	0,00		147.305.000	0,00		441.885.000	0,00	441.885.000	0,00	98,86	DINSOS
		1	0 6	0 6	2	0 2		Kegiatan Penyelenggara an Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggara an Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota (%)	65,0 0	447.000.00 0	0,00	-	65,0 0	447.000.000	0,00		70.525.000	0,00		112.090.000	0,00		111.965.000	0,00		147.305.000	0,00		441.885.000	0,00	441.885.000	0,00	98,86	
		1	0 6	0 6	2	0 2	0 2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota a (orang)	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota a (orang)	31	447.000.00 0		-	31	447.000.000	0,00	0	70.525.000	0,00	0	112.090.000	0,00	0	111.965.000	100,0 0	31, 00	147.305.000	100,0 0	31	441.885.000	31	441.885.000	100,0 0	98,86	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,0 0		15,78	0,0 0		25,08	0,0 0		25,05	100, 00		32,95	100, 00		98,86		100, 00	98,8 6		
Predikat Kinerja																SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		SR	ST		ST		ST	ST		
5	Meningkatn ya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1	0 6	0 7				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan (%)	65,0 0	447.000.00 0	0,00	-	65,0 0	581.773.873	0,00		15.229.634	0,00		24.529.451	0,00		299.364.451	0,00		73.130.918	0,00		372.254.454	0,00	372.254.454	0,00	83,28	DINSOS
		1	0 6	0 7	2	0 1		Kegiatan Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Terpelihara (%)	45,0 0	447.000.00 0	0,00	-	45,0 0	581.773.873	0,00		15.229.634	0,00		24.529.451	0,00		299.364.451	0,00		73.130.918	0,00		372.254.454	0,00	372.254.454	0,00	83,28	
		1	0 6	0 7	2	0 1	0 2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan nya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota a (makam)	4	447.000.00 0		-	4	581.773.873	25,0 0	1	15.229.634	25,0 0	1,0 0	24.529.451	25,0 0	1	299.364.451	0,00		73.130.918	75,00	3	372.254.454	3	372.254.454	75,00	83,28	

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														25,00		2,62	25,00		4,22	25,00		44,58	0,00		12,57	75,00		63,99			75,00	83,28					
Predikat Kinerja														SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	S		R			S	T					
6	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	28,00	6.194.276.973	25,93	14.987.558.161	29,00	4.737.243.727,00	0,00		712.655.635	0,00		1.490.950.254	0,00		1.111.127.035	0,00		1.188.442.368	0,00		4.503.175.292	25,93	19.490.733.453	89,41	314,68	DINSOS		
									Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	11,00		10,15	-	11,00		0,00		0,00			0,00				0,00					10,15		92,27					
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah								Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0,00		0,00	-	0,00		0,00		0,00			0,00				0,00				0,00			100					
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah								Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	74,00		72,00	-	74,00		0,00		0,00			0,00				0,00				72,00		97,30						
		1	06	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	41.537.500	100	102.764.790	100	55.000.000		820.000	0,00		410.000	16,67		20.878.937	33,33		30.438.563	50		52.547.500	100	156.312.290	100	373,91				
									Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100		100	-	100		25,00		25,00			25,00			25,00			75,00			100	-	100					
		1	06	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dokumen)	15	8.268.750	10	44.703.640	6	5.000.000	50,00	3	820.000	0,00	0	-	16,67	1	-	33,33	2,00	3.907.500	100,00	6	4.727.500	16	49.431.140	106,67	597,81			
		1	06	01	2	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	5	5.000.000			5	5.000.000	0,00	0	-	0,00	0	-	20,00	1	820.000	80,00	4,00	3.445.000	100,00	5	4.265.000	5	4.265.000	100,00	85,30			
		1	06	01	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	2	5.000.000			2	5.000.000	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	0	820.000	100,00	2,00	3.445.000	100,00	2	4.265.000	2	4.265.000	100,00	85,30			
		1	06	01	2	01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	2	5.000.000			2	5.000.000	100	2	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	0,00	0,00	4.920.000	100,00	2	4.920.000	2	4.920.000	100,00	98,40		
		1	06	01	2	01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	2	5.000.000			2	5.000.000	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00		820.000	100,00	2,00	3.970.000	100,00	2	4.790.000	2	4.790.000	100,00	95,80			
		1	06	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun (dokumen)	15	8.268.750	10	58.061.150	4	25.000.000	25,00	1	-	25,00	1	-	25,00	1	14.958.937,00	25,00	1	10.041.063	100,00	4	25.000.000	14	83.061.150	93,33	1004,52			

		1	06	01	2	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (laporan)	8	5.000.000			8	5.000.000	37,50	3	-	25,00	2	410.000	12,50	1	3.460.000	25,00	2,00	710.000	100,00	8	4.580.000	8	4.580.000	100,00	91,60	
		1	06	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100	3.948.202.056	100	10.054.876.667	100	3.090.311.140	25,00		467.587.846	25,00		1.119.031.552	25,00		621.164.354	25,00		681.331.926	100,00		2.889.115.678	100	12.943.992.345	100	336,36	
									Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (%)	100		100	-	100		25,00			25,00			25,00			25,00		100,00			100	-	100			
		1	06	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pemberan gan dan tunjangan ASN yang tertangani (bulan)	36	3.811.514.556	24	10.038.026.667	12	3.065.161.140	25,00	3	452.587.846	25,00	3	1.119.031.552	25,00	3	617.884.354	25,00	3	675.856.926	100,00	12	2.865.360.678	36	12.903.387.345	100,00	338,54	
		1	06	01	2	02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	15.150.000	12	15.150.000	12	15.150.000	25,00	3	15.000.000	25,00	3	-	25,00	3	-	25,00	3,00	150.000	100,00	12	15.150.000	12	15.150.000	100,00	100,00	
		1	06	01	2	02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	100,00	2	-	0,00	0	-	0,00	0	1.230.000	0,00	0,00	2.662.500	100,00	2	3.892.500	2	3.892.500	100,00	77,85	
		1	06	01	2	02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun(laporan)	42	16.537.500	28	16.850.000	40	5.000.000	25,00	10	-	25,00	10	-	25,00	10	2.050.000,00	25,00	10	2.662.500	100,00	40	4.712.500	68	21.562.500	161,90	130,39	
		1	06	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (%)	20,00	94.619.640	10,00	74.396.000	20,00	38.130.000	0,00		4.579.878	0,00		7.619.817	0,00		16.421.817	0,00		9.309.756	0,00		37.831.268	10,00	112.327.268	50,00	118,71	
									Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu (%)	100		100		100		25,00			0,00			0,00			0,00		25,00			100	-	100,00			
									Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik (%)	100		100		100		25,00			0,00			0,00			0,00		25,00			100	-	100,00			
		1	06	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia (set)	48	36.685.000	16	29.396.000	16	9.750.000	0,00	0,00	-	0,00	0	-	100,00	16	9.552.000,00	0,00	0,00	150.000	100,00	16	9.702.000	32,00	39.096.000	66,67	106,58	
		1	06	01	2	05	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11	28.167.140			11	28.380.000	27,27	3	4.579.878	27,27	3	7.619.817	27,27	3	6.869.817,00	18,18	2,00	9.159.756	100,00	11	28.229.268	11,00	28.229.268	100,00	100,22	
		1	06	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	6	29.767.500	3	45.000.000	2	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0,00	0	-	3,00	45.000.000	50,00	151,17	

	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	1	06	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	523.006.682	100	357.849.090	100	223.994.752	25,00		49.865.076	25,00		47.243.908			61.350.433	0,00		60.197.659	50,00		218.657.076	100	578.598.166	100	110,23		
		1	06	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani (bulan)	36	365.000.000	24	357.849.090	12	167.234.752	25,00	3	40.705.320	25,00	3	32.004.274	25,00	3	47.610.799	25,00	3	41.578.147	100,00	12	161.898.540	36	519.747.630	100,00	142,40		
									Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani (bulan)	36		24	-	12		25,00	3		25,00	3		25,00	3		25,00	3		100,00	12	-	36	-	100,00			
		1	06	01	2	06	10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	129.739.542			12	28.380.000	25,00	3	4.579.878	25,00	3	7.619.817	25,00	3	6.869.817	25,00	3	9.309.756	100,00	12	28.379.268	12	28.379.268	100,00	21,87		
		1	06	01	2	06	11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	28.267.140			12	28.380.000	25,00	3	4.579.878	25,00	3	7.619.817	25,00	3	6.869.817	25,00	3	9.309.756	100,00	12	28.379.268	12	28.379.268	100,00	100,40		
		1	06	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	644.833.595	95,00	739.336.800	100	120.880.130	0,00		-	0,00		42.450.000	0,00		74.750.000	0,00		350.000	0,00		117.550.000	0,00	856.886.800	0,00	132,88		
		1	06	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	45.608.595			1	45.608.595	0,00	0,00	-	100	1	42.450.000	0,00	0	-	0,00	0	150.000	100,00	1	42.600.000	1	42.600.000	100,00	93,40		
		1	06	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)	3	99.225.000	2	139.646.800	1	75.271.535	0,00	0,00	-	0,00	0	-	100,00	1,00	74.750.000,00	0,00	0	200.000	100,00	1	74.950.000	3	214.596.800	100,00	216,27		
		1	06	01	2	07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	1	500.000.000	1	599.690.000	0	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	0	-	1	599.690.000	100,00			
		1	06	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)	100	587.632.500	100	2.382.794.332	100	902.667.705	25,00		149.570.201	0,00		228.940.526	0,00		226.251.298	0,00		286.067.376	25,00		890.829.401	100	3.273.623.733	100	557,09		
									Persentase Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi (%)	100		3	-	100		3			0,00			0,00		0,00		3				3		3				
		1	06	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	407.925.000	24	2.076.876.650	12	771.969.995	25,00	3	124.544.322	25,00	3	198.930.367	25,00	3	194.648.812	25,00	3	248.790.281	100,00	12	766.913.782	36	2.843.790.432	100,00	697,14		
		1	06	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	108.045.000	24	124.271.342	12	65.245.000	25,00	3	12.251.866	25,00	3	14.620.525	25,00	3	14.969.215	25,00	3	17.681.983	100,00	12	59.523.589	36	183.794.931	100,00	170,11		

		1	06	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	71.662.500	24	181.646.340	12	65.452.710	25,00	3	12.774.013	25,00	3	15.389.634	25,00	3	16.633.271	25,00	3	19.595.112	100,00	12	64.392.030	36	246.038.370	100,00	343,33	
		1	06	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100	454.445,000	100	1.275.540.482	100	306.260.000	25,00		40.232.634	0,00		45.254.451	0,00		90.310.196	0,00		120.747.088	25,00		296.544.369	100	1.572.084.851	100	345,94	
		1	06	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	261.292.500	28	805.715.562	14	271.270.000	35,71	5	40.232.634	14,29	2	45.254.451	21,43	3	65.463.396	28,57	4	111.678.588	100,00	14	262.629.069	42	1.068.344.631	127,27	408,87	
		1	06	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22	23.152.500	2	32.055.400	20	9.690.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100,00	20	8.768.500	100,00	20	8.768.500	22	40.823.900	100,00	176,33	
		1	06	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	3	170.000,000	6	437.789.520	2	25.300.000	0,00	0,00	-	0,00	0	-	50,00	1	24.846.800	0,00		300.000	50,00	1	25.146.800	7	462.916.320	233,33	272,30	
Rata Rata Capaian Kinerja (%)															24,06		15,04	16,98		31,47	23,96		23,46	29,23		25,09	94,23		95,06			105,15	314,66		
Predikat Kinerja															SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN SOSIAL													8.916.566.670			868.025.619			2.562.436.105			2.485.576.842			2.234.156.106			8.150.194.672		43.190.122.898					
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Sosial (%)															10,86		9,73	9,86		28,74	28,71		27,88	45,91		25,06	95,34		91,41			127,90	308,64		
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Sosial															SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			ST	ST		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																			
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*) :																																			

*) Disi oleh Kepala Bappeda

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan IV dan asumsi-asumsi perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 maka perlu dilakukan penyesuaian target kinerja baik berupa penambahan atau pengurangan target kinerja, pergeseran output kegiatan, penyesuaian pagu indikatif baik berupa penambahan maupun pengurangan pagu indikatif dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025.

Pada Renja Awal Tahun 2025 ini, Dinas Sosial melakukan 6 Program , 15 kegiatan dan 48 sub kegiatan, karena dirasakan sangat penting sekali untuk keberlangsungan kegiatan pada tahun 2025 ini. Untuk Rekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif, seperti tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif

No	Uraian	Jumlah
1	Program	6
2	Kegiatan	15
3	Sub Kegiatan	48
4	Ouput Kegiatan	48

Sedangkan untuk Rumusan Rencana Program dan kegiatan perangkat Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2 seperti dibawah ini :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN BANGKA

OPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.997.347.000				6.130.512.500
		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah		27,50				28,00	
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah		13,00				13,5	
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Kab. Bangka	100%	60.000.000			100%	70.000.000
		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar		100%				100%	

1.06.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Kab. Bangka	8 Dokumen	30.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	8 Dokumen	35.000.000
1.06.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	6 Dokumen	30.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	6 Dokumen	35.000.000
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI		0%	3.889.280.000			0%	3.894.280.000
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Kab. Bangka	100%	3.889.280.000			100%	3.894.280.000
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		100%				100%	
1.06.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	31 Orang/14 bulan	3.859.280.000	Dana Alokasi Umum	P1	31 Orang/14 bulan	3.859.280.000
1.06.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bangka	12 Dokumen	15.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	15.000.000
1.06.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bangka	40 Dokumen	15.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	40 Dokumen	20.000.000
		Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah		67,00				68,00	
1.06.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	Kab. Bangka	100%	73.864.590			100%	128.500.000,00

		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian		100%				100%	
		Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		13,33%				25%	
1.06.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab. Bangka	2 Paket	15.364.590	Dana Alokasi Umum	P1	2 Paket	50.000.000
1.06.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka	11 Dokumen	28.500.000	Dana Alokasi Umum	P1	11 Dokumen	28.500.000
1.06.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Bangka dan Luar Daerah	4 Orang (2 Orang Laki-Laki dan 2 Orang Perempuan)	30.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	4 Orang (2 Orang Laki-Laki dan 2 Orang Perempuan)	50.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah		2			2		
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	Kab. Bangka	100%	257.000.000,00			100%	310.830.090
1.06.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka dan Luar Daerah	12 Laporan	200.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	253.830.090
1.06.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka	12 Dokumen	28.500.000	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	28.500.000
1.06.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangka	12 Dokumen	28.500.000	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	28.500.000
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		100				100	
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	100%	330.099.000			100%	330.099.000

1.06.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bangka	2 unit	50.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	2 unit	50.000.000
1.06.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab. Bangka	1 Paket	30.099.000	Dana Alokasi Umum	P1	1 Paket	30.099.000
1.06.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangka	1 Paket	50.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	1 Paket	50.000.000
1.06.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangka	1 unit	200.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	1 unit	200.000.000
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	100%	905.871.990			100%	905.871.990
1.06.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	12 Laporan	780.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	780.000.000
1.06.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangka	12 Laporan	60.645.000	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	60.645.000
1.06.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangka	12 Laporan	65.226.990	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	65.226.990
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Kab. Bangka	100%	481.231.420			100%	490.931.420,00
1.06.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bangka	14 Unit	270.931.420	Dana Alokasi Umum	P1	14 Unit	270.931.420
1.06.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Bangka	25 Unit	10.300.000	Dana Alokasi Umum	P1	1 Paket	20.000.000
1.06.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kab. Bangka	2 Unit	200.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	2 Unit	200.000.000

1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1.397.500.000				1.407.500.000,00
		Persentase PSKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial		82,00%				85,00%	
1.06.02.2.02	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian izin pengumpulan sumbangan	Kab. Bangka	82,00%	25.000.000			85,00%	25.000.000
<i>1.06.02.2.02.01</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>30 Dokumen</i>	<i>25.000.000</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>35 Dokumen</i>	<i>25.000.000</i>
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kab. Bangka	85,00%	1.372.500.000			90,00%	1.382.500.000
<i>1.06.02.2.03.01</i>	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>81 Orang</i>	<i>1.000.000.000</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>81 Orang</i>	<i>1.010.000.000</i>
<i>1.06.02.2.03.02</i>	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>8 Orang</i>	<i>110.000.000</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>8 Orang</i>	<i>110.000.000</i>
<i>1.06.02.2.03.03</i>	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>30 Keluarga</i>	<i>37.500.000</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>35 Keluarga</i>	<i>37.500.000</i>
<i>1.06.02.2.03.04</i>	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>13 Lembaga</i>	<i>200.000.000</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>13 Lembaga</i>	<i>200.000.000</i>
<i>1.06.02.2.03.05</i>	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)</i>	<i>Jumlah Sertifikat dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>10 sertifikat</i>	<i>25.000.000</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>15 sertifikat</i>	<i>25.000.000</i>

1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				320.000.000				390.000.000
		Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial		55,00%				58,00%	
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar	Kab. Bangka	50,00%	180.000.000			55,00%	215.000.000,00
1.06.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	150 Orang	40.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	175 Orang	50.000.000
1.06.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	60 Orang	30.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	70 Orang	35.000.000
1.06.04.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	40 Orang	40.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	45 Orang	40.000.000
1.06.04.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	5 orang	10.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	5 orang	10.000.000
1.06.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	60 Orang	10.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	65 Orang	20.000.000
1.06.04.2.01.06	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Bangka	5 orang	5.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	5 orang	5.000.000

1.06.04.2.01.07	Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	10 orang	5.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	10 orang	5.000.000
1.06.04.2.01.08	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	10 orang	10.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	10 orang	10.000.000
1.06.04.2.01.09	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	15 Orang	5.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	15 Orang	5.000.000
1.06.04.2.01.10	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	5 Orang	5.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	5 Orang	5.000.000
1.06.04.2.01.11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	10 orang	10.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	10 orang	10.000.000
1.06.04.2.01.12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	20 Orang	10.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	25 orang	20.000.000

1.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	Kab. Bangka	45,00%	140.000.000			50,00%	175.000.000
<i>1.06.04.2.02.03</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>200 Orang</i>	<i>40.000.000</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>250 Orang</i>	<i>50.000.000</i>
<i>1.06.04.2.02.05</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu</i>	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>50 Orang</i>	<i>50.000.000</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>55 Orang</i>	<i>60.000.000</i>
<i>1.06.04.2.02.07</i>	<i>Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</i>	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>100 orang</i>	<i>20.000.000</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>115 orang</i>	<i>35.000.000</i>
<i>1.06.04.2.02.11</i>	<i>Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga</i>	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>15 orang</i>	<i>10.000.000</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>20 orang</i>	<i>10.000.000</i>
<i>1.06.04.2.02.12</i>	<i>Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</i>	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>15 orang</i>	<i>10.000.000</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>20 orang</i>	<i>10.000.000</i>

1.06.04.2.02.13	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	25 Orang	10.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	30 Orang	10.000.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				770.000.000				846.400.000
		Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial		62,00%				65,00%	
1.06.05.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang mendapat pemeliharaan	Kab. Bangka	50,00%	20.000.000			55,00%	20.000.000
1.06.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	15 Anak	20.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	20 Anak	20.000.000
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Yang Dikelola	Kab. Bangka	86,00%	750.000.000			88,00%	826.400.000
1.06.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Bangka	103120 Orang	80.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	103120 Orang	100.000.000
1.06.05.2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	30000 Keluarga	20.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	30000 Keluarga	25.000.000
1.06.05.2.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	2500 keluarga	350.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	3000 keluarga	351.400.000

1.06.05.2.02.04	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	100 orang	300.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	15 Orang	350.000.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				525.000.000				590.000.000
		Persentase Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat Terhadap Kejadian Pasca Bencana		45,00%	525.000.000			50,00%	590.000.000
1.06.06.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Mendapat Perlindungan Sosial	Kab. Bangka	45,00%	105.000.000			50,00%	145.000.000
1.06.06.2.01.01	Sub kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	3000 Orang	40.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	3100 Orang	55.000.000
1.06.06.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	100 orang	25.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	150 orang	35.000.000
1.06.06.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	8 Tempat	15.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	8 Tempat	15.000.000

1.06.06.2.01.04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	20 Orang	15.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	30 Orang	20.000.000
1.06.06.2.01.05	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	15 Orang	10.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	15 Orang	20.000.000
1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	85,00%	420.000.000			90,00%	445.000.000
1.06.06.2.01.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	8 Kampung	20.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	8 Kampung	25.000.000
1.06.06.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	28 Orang	400.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	28 Orang	420.000.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				400.000.000				420.000.000

		Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		90,00%				100,00%	
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Terpelihara	Kab. Bangka	90,00%	400.000.000			100,00%	420.000.000
1.06.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	4 Makam	400.000.000	Dana Alokasi Umum	P1	4 Makam	420.000.000
					9.409.847.000				9.784.412.500

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka tahun 2025 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Dinas Sosial Kabupaten Bangka.

Kepala Dinas Sosial,
Kabupaten Bangka,



Bahrudin, SH
Pembina Tk I
NIP 19670714 198809 1 001